

Analisis Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Lembaga PAUD

Suhardi¹, Wanda Aisyah Amalia², Eka Safiatun Najah³, Difia Rahmadhani⁴

1,2,3,4 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: mrsuhardi12@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pembiayaan dalam pengelolaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tujuan utamanya adalah untuk memahami tentang manajemen pembiayaan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan di PAUD. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang digunakan oleh Lembaga PAUD yang meliputi bantuan pemerintah, iuran orang tua atau sumber pendanaan lainnya, dan bagaimana Lembaga PAUD menggunakan dana yang dimiliki seperti pengeluaran untuk gaji guru, fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu Library Research dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian. Pentingnya penelitian ini karena manajemen pembiayaan yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan di lembaga PAUD. Dengan memahami bagaimana dana dikelola, lembaga PAUD dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga PAUD masih bergantung pada iuran orangtua dan bantuan pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pembiayaan yang baik sangat penting bagi keberlangsungan manajemen pembiayaan yang dilakukan secara testuktur dan transparan yang merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Lembaga PAUD.

Kata kunci: *Manajemen Pembiayaan, Pengelolaan, Lembaga PAUD*

Abstract

The purpose of this research is to analyze financial management in the administration of Early Childhood Education Institutions (PAUD). The main objective is to understand financial management, which consists of the planning, implementation, and evaluation processes of finances in early childhood institution. Another aim of this research is to identify the sources of funding used by early childhood institutions, including government assistance, parental contributions, or other funding sources, and how early childhood institutions utilize their funds, such as expenditures for teacher salaries, facilities, teaching materials, or other operational needs. The research method used is Library Research, collecting data or scientific papers related to the research object. The importance of this research lies in the fact that effective financial management is crucial for the sustainability and quality of educational services in early childhood institutions. By understanding how funds are managed, early childhood institutions can optimize existing resources to provide quality education for young children. The research results show that most early childhood institutions still rely on parental contributions and government assistance as their main sources of funding. This study concludes that good financial management is essential for the continuity of financial management carried out in a structured and transparent manner, which is key to improving the quality of early childhood institution management.

Keywords: *Funding Management, Administration, Early Childhood Education Insitution*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak di usia dini, PAUD memiliki peran krusial dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Namun, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, lembaga PAUD memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien, terutama dalam aspek pembiayaan. Manajemen pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan lembaga PAUD. Pembiayaan yang terencana dan terkelola dengan baik akan memastikan keberlangsungan operasional lembaga, serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap manajemen pembiayaan dalam pengelolaan lembaga PAUD menjadi topik yang sangat relevan dan penting untuk dibahas. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi pembiayaan menjadi landasan utama dalam menganalisis manajemen pembiayaan lembaga PAUD. Aspek-aspek tersebut akan memberikan gambaran komprehensif tentang peran strategis pembiayaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi lembaga PAUD.

Manajemen adalah proses mengorganisasikan sesuatu sekelompok orang atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, kerjasama untuk menggunakan sumber dayanya. Manajemen memegang peranan penting dalam PAUD karena keberhasilannya tidak lepas dari pengelolaan yang baik. Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno, "management" yang berarti seni dalam pengorganisasian dan pelaksanaan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai upaya merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut pendapat George R. Terry yang dikutip oleh Usman Effendi mengatakan Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu penanaman modal atau investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh suatu lembaga. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu dari sumber daya berupa uang, tenaga, dan barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan pelaksanaan manajemen pengelolaan pendidikan.

Selanjutnya, identifikasi sumber-sumber pembiayaan menjadi hal yang tidak kalah penting. Lembaga PAUD perlu mengetahui dan mengoptimalkan berbagai sumber dana yang tersedia, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Pemahaman ini akan membantu lembaga PAUD dalam merancang strategi penggalangan dana yang efektif dan berkelanjutan. Langkah-langkah pembiayaan juga menjadi fokus utama dalam analisis ini. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Dengan memahami tahapan-tahapan ini, lembaga PAUD dapat mengembangkan sistem manajemen pembiayaan yang akuntabel dan transparan. Ruang lingkup pembiayaan dalam pengelolaan lembaga PAUD mencakup berbagai aspek, mulai dari pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, hingga pelaksanaan program pembelajaran. Analisis terhadap ruang lingkup ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang area-area yang memerlukan alokasi dana dan prioritas pembiayaan. Terakhir, pemanfaatan pembiayaan dalam pengelolaan lembaga PAUD menjadi aspek penting yang perlu dianalisis. Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana akan menentukan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara mengoptimalkan pemanfaatan dana menjadi kunci dalam mencapai tujuan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan lembaga PAUD menjadi semakin penting. Analisis manajemen pembiayaan

perlu mempertimbangkan pola kemitraan antara lembaga PAUD dengan pemerintah daerah, serta strategi untuk mengoptimalkan dukungan pembiayaan dari APBD. Inovasi dalam model pembiayaan juga menjadi aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pengembangan skema pembiayaan alternatif seperti kemitraan publik-swasta, *crowdfunding*, atau *social impact bonds* dapat menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan sumber pembiayaan konvensional.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. library research juga menjadi langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh penelitian sejenis, memperdalam kajian teori atau mempertajam metodologi. (Mustika, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pengelolaan keuangan pendidikan mencakup seluruh aspek finansial, termasuk upaya perolehan dan alokasi dana untuk mendukung kegiatan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahap ini melibatkan pengeluaran dari pihak sekolah dan orang tua siswa, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan efisiensi penggunaan dana. Manajemen keuangan merupakan elemen krusial dalam sistem pendidikan, berfokus pada pengelolaan sumber daya finansial lembaga pendidikan. Para ahli administrasi pendidikan mendefinisikannya sebagai proses sistematis dalam memperoleh dan mengalokasikan dana secara teratur, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan, manajemen keuangan meliputi serangkaian aktivitas, mulai dari perencanaan, pencatatan, pengeluaran, pengawasan, hingga pelaporan keuangan. Aspek pembiayaan sangat penting dalam menjamin kualitas proses pendidikan. Meski bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan, tanpa pengelolaan keuangan yang baik, pendidikan berkualitas tinggi akan sulit terwujud.

Aspek finansial memainkan peran vital dalam peningkatan mutu pendidikan, mengingat setiap aktivitas pendidikan memerlukan dukungan dana. Meskipun bukan isu baru, pembiayaan pendidikan selalu menjadi topik yang menarik perhatian, terutama menjelang tahun ajaran baru. Regulasi mengenai penyediaan dan pertanggung jawaban dana pendidikan telah dirancang dalam kerangka hukum yang belangsung. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, khususnya bab XIII pasal 46 ayat 1, menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Lebih lanjut, pasal 47 ayat 1 dan 2 mengatur tentang asal pembiayaan dalam pendidikan. Disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Selain itu, semua pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat - diwajibkan untuk mengarahkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Distribusi anggaran pendidikan dari pemerintah selama ini cenderung terbatas. Keterbatasan anggaran APBN untuk sektor pendidikan menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Zubaidi menegaskan bahwa kekurangan dana dan keterbatasan fasilitas merupakan tantangan utama dalam pendidikan Islam. Mengingat kondisi ini, pembiayaan dalam hal pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Diperlukan upaya optimalisasi sumber pembiayaan pendidikan yang melibatkan lingkungan pendidikan itu sendiri, terutama melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung penyediaan sumber daya untuk menyokong sistem pendidikan. Selain menyokong secara finansial, masyarakat juga diharapkan terlibat aktif dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan determinasi yang diatur dalam hukum tersebut. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan mencakup peran individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pelaku bisnis, dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan mutu layanan pendidikan. Masyarakat dapat turut serta sebagai penyedia sumber daya, penyelenggara kegiatan, dan penerima manfaat dari hasil pendidikan. Sejalan dengan peraturan tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan sumbangan dana yang telah diberikan kepada lembaga pendidikan, baik dari segi efisiensi maupun kualitas pelayanan yang terjamin.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah mengacu pada prinsip keterbukaan. Ini mencakup keterbukaan mengenai sumber pendapatan, jumlah dana yang dikelola, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat umum, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat. Sistem pembiayaan yang berpengaruh berperan penting dalam perwujudan pendidikan berkualitas dan menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan swasta. Dana yang berasal dari peserta didik merupakan sumber potensial untuk menjalankan manajemen pendidikan dan menjamin keberlanjutan operasional. Pengelolaan dan strategi penggalian dana pendidikan perlu difokuskan pada pendekatan kemitraan. Sumber pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan menjadi empat:

1. Dana dari pemerintah
2. Kontribusi masyarakat atau orang tua siswa
3. Dukungan dari sponsor dan perusahaan
4. Dana yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri

Dengan mengoptimalkan berbagai sumber dana ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka. Mengingat peran krusial pembiayaan dalam proses pembelajaran, pengelolaan keuangan yang efektif dalam anggaran pendidikan menjadi suatu keharusan. Pengelolaan ini dikenal sebagai manajemen pembiayaan. Namun, sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan finansial, seperti keterbatasan anggaran, penyalahgunaan dana, dan alokasi yang belum optimal.

Manajemen dapat diartikan sebagai proses yang meliputi perancangan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan. Proses ini melibatkan koordinasi anggota dan sumber daya suatu organisasi untuk meraih tujuan secara efektif dan efisien. Konsep manajemen mencakup tiga elemen penting: adanya upaya kerjasama, melibatkan dua orang atau lebih, dan bertujuan perolehan sasaran yang telah ditetapkan. Biaya merujuk pada jumlah uang yang dihasilkan dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dalam konteks pendidikan, biaya mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Pendanaan dalam pendidikan meliputi total biaya yang dikeluarkan oleh berbagai pihak, termasuk peserta didik, keluarga, masyarakat (baik individu maupun kelompok), serta pemerintah, untuk memastikan kelancaran proses pendidikan. (Sonedi, 2017)

Manajemen pembiayaan dalam konteks pendidikan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana di institusi pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan lainnya. Proses ini terdiri dari tiga komponen utama:

1. Penyusunan pada anggaran yang ada (budgeting)
2. Pembukuan pada anggaran (accounting)
3. Pemeriksaan anggaran (auditing)

Anggaran pada dasarnya adalah perencanaan dalam operasional yang dinyatakan secara kuantitatif sebagai RAPBS. Hal ini berfungsi sebagai panduan dalam kegiatan sekolah dengan proyeksi pendapatan serta pengeluaran untuk adanya program pendidikan.

Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan adalah untuk memaksimalkan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah dan yayasan. Manajemen keuangan juga bertujuan untuk mengelola dana dengan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, tujuan utama manajemen pembiayaan pendidikan yaitu memperoleh bobot sekolah yang diharapkan melalui pengelolaan biaya pendidikan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Tujuan spesifik meliputi:

1. Peningkatan Mutu dari Pendidikan: Melalui manajemen dana pendidikan yang efektif dan efisien.
2. Optimalisasi Penggunaan Dana: Memaksimalkan penggunaan dana untuk mendukung visi, misi, dan kebijakan lembaga pendidikan.
3. Efisiensi Biaya: Mengurangi biaya pendidikan agar lebih efektif dan efisien.
4. Peningkatan Fokus Belajar: Dengan jaminan biaya pendidikan yang baik, siswa dapat lebih berkonsentrasi pada pembelajaran dan peningkatan kemampuan akademis mereka. (Azhari & Kurniady, 2016)

Pengelolaan keuangan yang efektif dalam pendidikan tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas terhadap mutu pendidikan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, peran kepala sekolah menjadi sangat krusial. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan manajemen pembiayaan yang optimal, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, manajemen pembiayaan pendidikan menjadi faktor penentu dalam mencapai sasaran pendidikan yang lebih unggul. Lebih jauh lagi, pengelolaan keuangan yang tepat berperan sebagai katalis dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Singkatnya, manajemen pembiayaan yang efektif, dipimpin oleh kepala sekolah yang kompeten, tidak hanya mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan mutu pendidikan secara holistik. (Sururi, 2024)

Selanjutnya, dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, terdapat beberapa fungsi penting yang perlu diperhatikan:

a. Optimalisasi Sumber Dana

Fungsi ini berfokus pada kemampuan lembaga pendidikan untuk memaksimalkan penggunaan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia. Setiap dana yang diterima harus dikelola dengan cermat, disimpan dengan aman, dan dimanfaatkan secara efektif. Sumber keuangan sekolah bisa melalui berbagai pihak, termasuk orangtua siswa, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dunia usaha, dan alumni. Penting bagi lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan setiap potensi sumber dana guna memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan.

b. Alokasi

Alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengambilan keputusan keuangan yang kritis. Pada tahap ini, kebijakan mengenai distribusi dana pendidikan ditentukan. Penting untuk memprioritaskan program-program yang paling esensial dalam proses pendidikan ketika membuat keputusan alokasi. Para pengelola keuangan harus memiliki kemampuan analisis yang tajam untuk memahami situasi dan kondisi organisasi mereka, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya. Alokasi yang tepat akan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan pendidikan.

c. Distribusi

Distribusi merupakan tahap implementasi dari rencana alokasi yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah disetujui sebelumnya. Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan sangat penting dalam tahap ini. Dana harus dikeluarkan sesuai dengan rancangan – rancangan yang sudah disetujui bersama dalam organisasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana digunakan sesuai dengan tujuannya dan dapat dipertanggung jawabkan. (Lestari, 2017)

Sumber Pembiayaan

Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Pendanaan ini tidak hanya berasal dari satu pihak, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Secara umum, dana untuk mendukung proses pendidikan dapat bersumber dari masyarakat luas, pemerintah, dan juga dari individu-individu yang secara langsung menerima manfaat dari pendidikan tersebut.

Di konteks Indonesia, ketentuan mengenai biaya pendidikan telah diatur dalam UUD pada pasal 33. Berdasarkan aturan tersebut, beban pembiayaan pendidikan dibagi antara tiga pihak utama: pemerintah, masyarakat, dan orangtua peserta didik. Pengaturan ini memiliki makna hukum yang mendalam, yaitu bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan kepentingan bersama yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan orang banyak.

Pembiayaan pendidikan yang melibatkan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang krusial bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, beban pembiayaannya tidak diletakkan hanya pada satu pihak, melainkan didistribusikan secara proporsional kepada berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan pendidikan.

Dalam konteks sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sumber-sumber keuangan dapat berasal dari beragam pihak. Ini mencerminkan kompleksitas dan luasnya jaringan pendukung yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem pendidikan yang berkualitas. Setiap sumber pembiayaan memiliki peran dan kontribusi yang unik dalam mendukung berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di sekolah. (Rudiyanto, 2010). Sumber keuangan sekolah terdiri dari:

a. Dana dari pemerintah

Dana dari pemerintah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan sekolah. Pemerintah menyediakan dana ini melalui anggaran rutin yang tercantum didalam Daftar Isian Kegiatan (DIK). DIK diberikan kepada sekolah untuk setiap tahun ajaran yang sering disebut sebagai dana rutin. Besaran dana yang diberikan dalam DIK umumnya ditetapkan berdasarkan total siswa di sekolah tersebut. Dalam DIK, pemerintah telah menentukan budget dan besaran biaya untuk setiap bentuk pengeluaran. Penting bagi sekolah untuk memastikan bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban dana rutin ini sesuai dengan budget yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diserahkan secara sistematis dan diperuntukkan untuk membantu seluruh kegiatan sehari-hari sekolah. Program dana BOS ini memiliki tujuan untuk meringankan beban anggaran pendidikan untuk masyarakat dan meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas.

b. Dana dari orangtua

Dana dari orangtua siswa, yang umumnya disebut dengan iuran komite. Besaran sumbangan dari orangtua ditetapkan melalui rapat komite sekolah, yang melibatkan perwakilan orang tua dan pihak sekolah. Dana komite ini biasanya terdiri dari beberapa komponen:

1. dana tetap bulanan. Ini merupakan sumbangan rutin yang harus dibayarkan oleh orangtua disetiap bulannya selama anak mereka terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Dana ini biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah sehari-hari.
2. Dana insidental. Dana ini diberatkan kepada siswa yang baru masuk sekolah dan umumnya hanya dibayarkan satu kali selama masa belajar tiga tahun. Meskipun merupakan pembayaran satu kali, sekolah umumnya memberikan opsi untuk membayar secara angsuran guna meringankan beban orang tua.
3. dana sukarela. Komponen ini bersifat opsional dan biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa yang memiliki kemampuan finansial lebih dan bersedia memberikan

sumbangan tambahan secara sukarela. Penting untuk dicatat bahwa sumbangan sukarela ini diberikan tanpa ada ikatan atau kewajiban apapun dari pihak sekolah.

c. Dana dari masyarakat

Dana dari masyarakat ialah bentuk kontribusi sukarela yang diberikan oleh berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan ini bersifat tidak mengikat dan mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Para penyumbang ini terdorong oleh keinginan untuk berkontribusi pada kemajuan pendidikan di lingkungan mereka. Sumber dana dari masyarakat ini dapat berasal dari berbagai pihak. Ada yang merupakan sumbangan perorangan, yaitu individu-individu yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Selain itu, organisasi-organisasi tertentu juga terkadang memberikan bantuan finansial kepada sekolah.

d. Dana dari peserta kegiatan

Dana ini dikumpulkan dari siswa atau masyarakat yang berpartisipasi dalam program-program pendidikan tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. Contoh kegiatan tersebut antara lain kursus komputer, kursus Bahasa Inggris, atau berbagai jenis pelatihan lainnya.

Pemungutan biaya dari peserta kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu membantu sekolah untuk menutupi biaya operasional dari kegiatan-kegiatan tambahan dan pendekatan ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan apresiasi peserta terhadap kegiatan yang mereka ikuti. Namun, penting bagi sekolah untuk memastikan bahwa biaya yang dibebankan tetap terjangkau dan tidak menjadi penghalang bagi siswa atau anggota masyarakat yang ingin mengembangkan keterampilan mereka.

e. Dana dari kegiatan wirausaha sekolah

Sebagian sekolah mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan usaha guna menghasilkan biaya tambahan. Aktivitas wirausaha ini dapat dikelola oleh karyawan sekolah atau melibatkan para murid, memberikan nilai tambah berupa pengalaman praktis dalam berwirausaha. Contoh-contoh kegiatan wirausaha sekolah meliputi pengelolaan koperasi sekolah, yang menyediakan berbagai kebutuhan siswa dan staf. Kantin sekolah juga menjadi sumber pendapatan potensial, selain menyediakan makanan sehat bagi warga sekolah. Bazar tahunan merupakan event yang tidak hanya menghasilkan dana tetapi juga memperkuat ikatan komunitas sekolah. Beberapa sekolah juga mengelola layanan seperti warung telekomunikasi (wartel) atau usaha fotokopi untuk memenuhi kebutuhan siswa dan menghasilkan pendapatan. (Hidayah, 2022)

f. Pemanfaatan sumber dana yayasan

Yayasan yang menaungi mereka memainkan peran penting dalam pembiayaan pendidikan. Yayasan, sebagai badan hukum, memiliki aset yang dialokasikan khusus untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kekayaan yayasan dapat berasal dari berbagai sumber yang tidak mengikat, termasuk sumbangan, wakaf, hibah, dan wasiat. Yayasan juga dapat memperoleh dana dari sumber lain asalkan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sumber daya ini, yayasan memiliki kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah yang mereka naungi. (Tanfidiyah, 2022)

Langkah-Langkah Pembiayaan

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan PAUD adalah menyusun rencana keuangan yang dilakukan secara menyeluruh dan sesuai untuk satu tahun ajaran sekolah. Rencana ini dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan sekolah PAUD dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Terdapat dua bagian penting dalam perencanaan ini. Pertama, memperkirakan berapa pembiayaan uang yang akan masuk ke sekolah, dan kedua, merencanakan bagaimana pembiayaan uang itu akan digunakan.

Perencanaan pembiayaan ini sangat penting untuk membantu sekolah PAUD untuk mengatur keuangannya dengan baik. Dengan adanya perencanaan yang jelas, sekolah bisa memastikan bahwa mereka mempunyai dana yang cukup untuk semua kegiatan penting, seperti membayar guru, membeli alat-alat belajar, dan memperbaiki ruang kelas jika diperlukan dan lainnya. Dengan adanya perencanaan yang baik juga membantu sekolah menggunakan keuangannya dengan efektif dan efisien. (Sinta. R, 2022)

Dalam perencanaan pembiayaan sekolah terdapat dua langkah utama yang sangat penting. Pertama, menyusun Anggaran Belanja Sekolah (ABS) yang mencakup dua aspek utama: 1) sumber dana yang perlu dikelola dengan bertanggung jawab, seperti Dana Pembangunan Pendidikan (DPP) dan Operasi Perawatan Fasilitas (OPF), 2) rincian pengeluaran untuk berbagai keperluan sekolah. Pengeluaran ini meliputi biaya kegiatan belajar-mengajar, pengadaan dan perawatan sarana-prasarana, pembelian bahan dan alat pelajaran, serta pembayaran gaji dan tunjangan kesejahteraan. Tahap kedua adalah mengembangkan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) yang lebih terperinci. Dengan perencanaan yang matang ini, sekolah dapat mengelola keuangannya secara efektif, memastikan semua sumber dana digunakan dengan tepat dan semua kebutuhan penting dapat terpenuhi selama tahun ajaran. (Tanfidiyah, 2022)

2. Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan

Pengorganisasian dalam lembaga pendidikan adalah proses penting untuk mengatur program dan kegiatan untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam pengorganisasian ini melibatkan penempatan orang-orang pada tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka, menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan membagi wewenang kepada setiap individu yang terlibat. Dalam konteks pendidikan, proses ini mencakup pembagian tugas kepada guru dan staf berdasarkan potensi dan kompetensi mereka, mengalokasikan sumber daya dengan tepat, dan mengkoordinasikan semua elemen untuk mencapai efektivitas organisasi. Dalam pengorganisasian pembiayaan pendidikan, langkah utama yang sangat penting adalah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) dengan melibatkan beberapa tahap penting yaitu merinci pekerjaan yang perlu dilakukan, membagi tugas-tugas tersebut, menyatukan berbagai aspek pekerjaan, dan mengkoordinasikan semuanya. Dengan pendekatan terstruktur ini, sekolah dapat mengelola sumber daya keuangan secara efisien, memastikan setiap orang memahami peran mereka, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Mulyasa, seperti yang dikutip oleh Qurata dalam jurnalnya, menjabarkan langkah-langkah pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) secara rinci. a) Melibatkan staf sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan biaya. b) Dilakukan klasifikasi dan perhitungan kebutuhan, diikuti dengan analisis dana dan seleksi alokasi yang diperlukan. c) Membentuk koordinasi dengan komite sekolah d) mengadakan rapat pengurus serta anggota. e) Mengembangkan kegiatan terkait RAPBM f) Mensosialisasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan melibatkan konsultasi dan pelaporan kepada pengawas, serta pengajuan usulan RAPBM ke Kantor Wilayah Departemen Agama untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan. Proses ini memastikan bahwa perencanaan anggaran sekolah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. (Sinta. R, 2022)

3. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan manajemen keuangan PAUD, penting untuk mengikuti rencana yang sudah dibuat di awal. Tujuan utamanya adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan yang baik. Oleh karena itu, semua sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sekolah diarahkan untuk memberikan layanan PAUD yang berkualitas.

Novan Ardy menyatakan dalam karyanya bahwa proses pembiayaan terdiri dari dua tahap utama. Dalam konteks manajemen pembiayaan pendidikan, alokasi dana harus sejalan dengan rencana yang telah disusun oleh institusi. Aspek ini berkaitan erat

dengan upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, di mana seluruh sumber daya perlu dikelola secara terintegrasi.

Pelaksanaan pembelanjaan di lembaga pendidikan terbagi menjadi dua aspek utama: penerimaan dan pengeluaran dana.

a) Penerimaan

Dalam hal penerimaan, setiap dana yang masuk ke lembaga pendidikan harus dicatat dengan metode yang sesuai. Sistem pengelolaan keuangan ini harus disetujui oleh pihak sekolah dan mengikuti pedoman teoretis atau peraturan pemerintah yang berlaku. Pembukuan penerimaan pembiayaan untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengikuti arahan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pencatatan keuangan mengacu pada panduan dari pemerintah pusat. PAUD sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk patuh pada ketentuan yang ditetapkan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dananya. Peran PAUD dalam manajemen pembiayaan terbatas pada pengelolaan dana operasional sehari-hari. Untuk menangani hal tersebut, lembaga PAUD biasanya menunjuk seorang bendahara sebagai pengelola keuangan utama sekolah. Tugas bendahara ini mencakup pencatatan semua dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan oleh sekolah, serta bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan keuangan.

b) Pengeluaran

Pengeluaran sekolah ini mencakup berbagai biaya dalam kegiatan sehari-hari, termasuk gaji untuk staf administrasi dan guru, serta pembelian perlengkapan untuk menunjang fasilitas sekolah. Penting untuk mencatat setiap pengeluaran ini sebagai bagian dari evaluasi dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Dana yang diperoleh lembaga PAUD harus dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien. Setiap pengeluaran harus selaras dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya, secara merinci yang dibutuhkan sekolah. Dalam pengelolaan keuangan pendidikan, diperlukan pencatatan yang teliti atas masuk dan keluar dana sekolah. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembukuan yang rapi, sistematis, dan akurat. Tujuan utama dari pembukuan ini adalah untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, yang kemudian dilaporkan secara resmi. Laporan keuangan ini menjadi instrumen penting untuk evaluasi kinerja lembaga pendidikan. (Sinta. R, 2022)

4. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan.

Dalam tahap pengawasan, lembaga pendidikan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Fokus pengawasan ini mencakup dua aspek utama: pertama, mengamati proses perencanaan keuangan, dan kedua, memantau bagaimana rencana tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan pembiayaan sehari-hari di sekolah.

Pengawasan dalam manajemen keuangan pendidikan merupakan upaya sadar untuk mencegah penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Proses ini memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran dana terkontrol dengan baik, dan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Di lembaga PAUD, terdapat dua jenis pengawasan keuangan. Pertama, pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pihak resmi seperti yayasan penyelenggara PAUD dan pengawas dari pemerintah. Kedua, pengawasan melekat yang menjadi tanggung jawab langsung pihak sekolah, dengan kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama. Kedua jenis pengawasan ini harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. . (Sinta. R, 2022)

5. Evaluasi

Dalam proses manajemen keuangan pendidikan, evaluasi merupakan tahap penutup yang krusial yang berfungsi sebagai mekanisme penilaian akhir, di mana seluruh aktivitas keuangan dikaji berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini tidak hanya sekadar pemeriksaan angka-angka, tetapi juga

mencakup analisis mendalam tentang efektivitas penggunaan dana dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Hasil dari evaluasi ini kemudian disusun dalam bentuk laporan yang komprehensif. Laporan tersebut selanjutnya dipresentasikan kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kepentingan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Proses ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Nanang Fattah menekankan beberapa tujuan penting dari evaluasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan. a) evaluasi berfungsi sebagai landasan untuk menilai pencapaian dan mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang perlu perhatian di akhir suatu periode kerja. b) proses ini membantu memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja staf, yang pada gilirannya mendorong penggunaan sumber daya pendidikan - termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan dana - secara optimal. c) evaluasi berperan dalam mengungkap fakta-fakta penting terkait tantangan, hambatan, atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam berbagai program sekolah. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. (Sinta. R, 2022)

Evaluasi memiliki peran yang beragam di setiap tahapnya dalam manajemen keuangan pendidikan. Sering kali, evaluasi dipandang sebagai alat pencegahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta memanfaatkan hasilnya guna meningkatkan kinerja di masa depan. Meskipun pencegahan kesalahan merupakan fungsi penting evaluasi, pendekatan ini memiliki keterbatasan mendasar. Dalam konteks pembiayaan sekolah, evaluasi dan pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi tiga aspek utama. Pertama, metode pengendalian penggunaan dana yang dialokasikan. Kedua, format pelaporan keuangan sekolah. Ketiga, keterlibatan pihak eksternal dalam proses pengawasan keuangan sekolah. Pendekatan ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk tidak hanya menilai efektivitas penggunaan dana, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan melibatkan pihak eksternal, sekolah dapat mendapatkan perspektif objektif yang dapat meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangannya. (Masditou, 2017)

Ruang lingkup dalam Pembiayaan Pengelolaan Lembaga PAUD

Depdiknas mendefinisikan manajemen keuangan sebagai serangkaian kegiatan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Kegiatan ini mencakup beberapa tahap penting, mulai dari proses pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Dalam konteks sekolah, manajemen keuangan dapat dipahami sebagai suatu sistem terpadu yang melibatkan berbagai aktivitas pengelolaan sumber daya finansial di lembaga pendidikan. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan anggaran, dilanjutkan dengan pembukuan yang rinci, pelaksanaan anggaran atau pembelanjaan, pengawasan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban penggunaan dana. Setiap tahap dalam manajemen keuangan sekolah ini saling terkait dan bertujuan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Lingkup manajemen keuangan mencakup serangkaian proses yang luas, dimulai dari upaya mencari sumber pendanaan, strategi pengalokasian dana yang diperoleh, hingga pemanfaatan keuntungan dari pengelolaan keuangan tersebut. Dalam konteks pendidikan, manajemen keuangan sekolah berperan penting dalam mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki lembaga yang melibatkan perencanaan anggaran, pengalokasian dana untuk berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan, serta evaluasi efektivitas penggunaan dana. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pendidikan memberikan manfaat maksimal bagi proses pembelajaran dan pengembangan sekolah. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat

memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Juairia et al., 2022)

Manajemen memiliki tiga ruang lingkup, yaitu perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau evaluasi (auditing).

1. Perencanaan keuangan (budgeting)

Perencanaan keuangan, yang juga dikenal sebagai budgeting, adalah kegiatan menyusun rencana anggaran. Anggaran itu sendiri adalah dokumen yang menampilkan rencana keuangan dalam bentuk angka atau nilai uang. Fungsi dari anggaran ini adalah untuk menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan pengeluaran selama periode waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, anggaran membantu dalam merencanakan dan mengatur penggunaan dana agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Untuk menentukan biaya satuan pendidikan, ada dua metode yang bisa digunakan Metode pertama, yaitu pendekatan makro, melibatkan perhitungan total biaya pendidikan yang mencakup semua sumber dana yang diterima oleh lembaga pendidikan, kemudian membaginya dengan jumlah siswa yang ada. Sebaliknya, pendekatan mikro mengukur biaya pendidikan dengan cara yang lebih rinci, yaitu dengan menghitung alokasi pengeluaran untuk masing-masing komponen pendidikan yang digunakan oleh siswa.

2. Pelaksanaan (akunting)

Akuntansi berfungsi untuk mencatat dan menggambarkan hasil dari aktivitas ekonomi. Dalam pelaksanaan keuangan sekolah, aktivitas yang melibatkan uang dari berbagai sumber dana terbagi menjadi dua yaitu penerimaan (uang yang diterima) dan pengeluaran (uang yang dikeluarkan). Keduanya harus dicatat atau dibukukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prosedur pengelolaan yang telah ditetapkan, harus mengikuti aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat dan transparan, serta sesuai dengan standar yang berlaku untuk pengelolaan keuangan yang baik.

3. Tahap penilaian atau evaluasi (auditing).

Auditing adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi yang dapat diukur mengenai kegiatan entitas ekonomi, yang dilakukan oleh seorang profesional yang kompeten. Tujuannya adalah untuk melaporkan apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan. Hal ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan atau informasi lainnya akurat dan dapat dipercaya. Secara sederhana, pengawasan ini melibatkan pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan terkait manajemen pembiayaan berlangsung secara efektif dan efisien, serta untuk mencegah adanya penyimpangan dalam prosesnya. (Djuwairiyah et al., 2021)

Pemanfaatan dalam Pembiayaan Pengelolaan Lembaga PAUD

Dari hasil evaluasi aspek implementasi yang terkait dengan manajemen keuangan sekolah, terutama terkait kesesuaian antara perencanaan dan penggunaan dana, menunjukkan tingkat kinerja yang sangat baik. Kepala sekolah telah menunjukkan dedikasi dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi serta misi sekolah serta RKAS. RKAS memegang peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan dengan menyusun aktivitas pembelajaran yang sesuai. Pengelolaan keuangan sekolah diselaraskan dengan alokasi dana dari pemerintah daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Otoritas sekolah diberikan kepercayaan penuh untuk menggunakan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pendanaan BOS mencakup ragam komponen yang mendukung kegiatan pendidikan, ini termasuk proyek-proyek seperti peningkatan fasilitas perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, program pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan ujian, pembelian perlengkapan sekolah, pembayaran honorarium bagi guru dan

staf pendidikan non-pns, pengembangan keterampilan guru, dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus, serta investasi dalam teknologi informasi. Oleh karena itu, sekolah yang menerima dana publik diharapkan untuk mengelola keuangan secara efektif sesuai dengan rencana strategis demi mewujudkan visi dan misi pendidikan mereka.

Manajemen keuangan di institusi pendidikan dimulai dengan tahapan perencanaan anggaran. Tujuan proses ini adalah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan keuangan secara seimbang setiap bulan. Pengeluaran reguler meliputi biaya tenaga kerja, pendidikan, administrasi, operasional, pemasaran, perawatan, dan pajak. Sedangkan pengeluaran non-reguler, seperti renovasi atau pembaruan fasilitas, dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Implementasi rencana keuangan yang telah disetujui oleh otoritas seperti ketua yayasan dan kepala sekolah harus mengikuti prinsip transparansi, dengan memberikan akses kepada pihak terkait. Penggunaan dana dilacak melalui sistem pembukuan yang mencatat setiap transaksi bulanan secara detail. Laporan pengeluaran disampaikan oleh bendahara kepada seluruh staf dan pihak berwenang dengan cara terbuka didalam rapat bulanan atau semester.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana. Proses evaluasi ini melibatkan bendahara bersama dengan pihak yayasan. Dengan demikian, seluruh proses manajemen pembiayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dilakukan secara sistematis dan transparan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

SIMPULAN

Manajemen pembiayaan di lembaga PAUD adalah proses pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan operasional lembaga. Tujuan utama dari manajemen pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa lembaga PAUD memiliki dana yang cukup untuk menjalankan program-programnya secara efektif, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Fungsi utama dari manajemen pembiayaan mencakup perencanaan keuangan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi keuangan. Fungsi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan memastikan akuntabilitas keuangan lembaga. Sumber-sumber pembiayaan lembaga PAUD bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk dana pemerintah, donasi dari masyarakat, dan kontribusi orang tua. Langkah-langkah dalam manajemen pembiayaan mencakup identifikasi kebutuhan keuangan, penyusunan anggaran, pengumpulan dan pengalokasian dana, pengelolaan kas, serta pelaporan dan evaluasi keuangan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana. Ruang lingkup manajemen keuangan mencakup serangkaian proses yang luas, dimulai dari upaya mencari sumber pendanaan, strategi pengalokasian dana yang diperoleh, hingga pemanfaatan keuntungan dari pengelolaan keuangan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini. Sehingga artikel yang berjudul "Analisis Manajemen Pembiayaan Pengelolaan Lembaga PAUD" dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa apa yang kami paparkan dalam artikel ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan yang lebih banyak dari para pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudiyanto. (2010). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. *Manajerial*, 9 No. 17, 55-62.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan* , Vol.XXIII No.2 .

- Sonedi. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *FENOMENA*, Vol.9 No.1, 25-27.
- Masditou. (2017, Juli-Des). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Ansiru PAI*, Vol 1 No. 2, 119-145.
- Lestari, A. (2017). Manajemen Pembiayaan Terpadu (Studi atas Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sukorejo Ponorogo). *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 10-155.
- Djuwairiyah, Muqit, A., & Listiana, H. (2021, April). Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Multicultural*, Volume 4 Nomor 2, 81-93.
- Juairia, Sapitri, A. P., Audina, M., & Wulandari, R. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Multidisipliner KAPALAMADA*, Vol 1. No 3, 298-306.
- Sinta, R. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di KB Queenza Cilongok Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Tanfidiyah, N. (2022, Januari-Juni). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Paud Ndasari Budi Krpyak Yogyakarta. *Jurnal Al Athfal*, V, 17-32.
- Sururi, M. F. (2024). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banyuwangi. *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shidiq Jember Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan*.